

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2016. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arawanda Nawagamuwa and nils Viking, 2003, *Slums Squatter Area and Informal Settlement*, 9th International Conference on Sri lanka Studies.
- Keban, Yeremias T.. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media Buku.
- Kismartini, dkk.. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Kurniasih, S., 2007. *Usaha Perbaikan Pemukiman Kumuh Di Petukangan Utara-Jakarta Selatan*. Universitas Budi Luhur.
- Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2013. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Utomo, Warsito. 2012. *Administrasi Publik Baru Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Jurnal :

Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 88-105.

Kumala, Sri dan Fitri Yusman. 2014. Kajian Karakteristik dan Metode Penanganan Kawasan Kumuh (Studi Kasus: Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang). *Jurnal Teknik PWK: Vol. 3, No. 2*.

Mahabir, Ron, dkk.. *The Study of Slums as Social and Physical Constructs: Challenges and Emerging Research Opportunities*. Jurnal Internasional: Regional Studies Regional Science.

Meisya, Alisa Rizky. 2015. *Implementasi Program Keluarga Berencana Bagi Pria Di Kota Bandar Lampung (Analisis Peraturan Kepala BKKBN Nomor 145/Hk.010/B5/2009 Tentang Peningkatan Partisipasi Pria)*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Nabila, S. F. (2018). Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Semarang Melalui Pelaksanaan Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) Studi Kasus Kebonharjo RT. 02 RW. 05 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(01), 171-180.

Nursyahbani, Raisya dan Bitta Pigawati. 2015. *Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh di Kampung Kota (Studi Kasus: Kampung Gandekan Semarang)*. Jurnal Teknik PWK: Vol. 4, No. 2.

Prihatanto, A., & Giyarsih, S. R. (2013). *Identifikasi Kondisi Kebencanaan di Kawasan Kepesisiran Kecamatan Tugu Kota Semarang*.

Sinthia, S. Ahmed. *Sustainable Urban Development of Slum Prone Area of Dhaka City*. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering Vol:7, No:3.

Bardhan, R., Sarkar, S., Jana, A., & Velaga, N. R. (2015). *Mumbai slums since independence: Evaluating the policy outcomes*. *Habitat International*, 50, 1–11. doi:10.1016/j.habitatint.2015.07.009

- Muchadenyika, D., & Waiswa, J. (2018). *Policy, politics and leadership in slum upgrading: A comparative analysis of Harare and Kampala. Cities.* doi:10.1016/j.cities.2018.05.005
- Das, A. K., & Takahashi, L. M. (2009). *Evolving Institutional Arrangements, Scaling Up, and Sustainability. Journal of Planning Education and Research, 29(2), 213–232.*
- Zethary, R. E., & Purnaweni, H. (2019). Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review, 8(4), 224-238.*

Dokumen :

- Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Profil Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.*
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. *Sekilas Informasi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).*
- Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2016. *Surat Edaran No. 40/SE/DC/2016 tentang Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh.*
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2016-2021.
- Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Studi Evaluasi Penanganan Permukiman Kumuh dan Profil Permukiman Kumuh DALAM RP2KPKP KOTA SEMARANG TAHUN 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Situs :

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2017. *Tentang Program Kotaku*.
<http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh-kotaku>.
Diakses pada 29 Mei 2019.

Kecamatan Tugu. 2020. Kelurahan Mangunharjo
<http://kectugu.semarangkota.go.id/kelurahan-mangunharjo>. Diakses pada 23
Januari 2020.

Kecamatan Tugu. 2020. Kelurahan Mangkang Wetan.
<http://kectugu.semarangkota.go.id/kelurahan-mangkang-wetan>. Diakses pada 23
Januari 2020

Kecamatan Tugu. 2020. Kelurahan Mangkang Kulon.
<http://kectugu.semarangkota.go.id/kelurahan-mangkang-kulon>. Diakses pada 23
Januari 2020.

Semarang Inside. 2019. Waduh, Luasan Abrasi Semarang Capai 1.406 Hektare.
<https://semaranginside.com/waduh-luasan-abrasi-semarang-capai-1-406-hektare/>. Diakses pada 23 Maret 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara

A. Koordinator Kota Program Kotaku di Kota Semarang

Persiapan

1. Persepsi terhadap Program Kotaku (apa tujuan dan manfaatnya)
2. Bagaimana program Kotaku dibandingkan dengan program lain untuk mengatasi kawasan kumuh?
3. Siapa saja pelaksana program?
4. Sosialisasi yang dilakukan kepada penyelenggara program
5. Komitmen para penyelenggara program

Perencanaan

1. Siapa saja yang melakukan persiapan perencanaan program?
2. Bagaimana penyusunan perencanaan dilaksanakan program Kotaku?

Pelaksanaan

1. Penganggaran yang dilakukan oleh setiap penyelenggara program
2. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan aturan yang telah ditetapkan kepada penyelenggara terkait
3. Pembagian tugas dalam pelaksanaan program
4. Kerja sama para aktor program dalam pelaksanaan program

Keberlanjutan

1. Aktor/pelaku monitoring program
2. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penguatan program

B. BKM Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu

Persiapan

1. Persepsi terhadap Program Kotaku (apa tujuan dan manfaatnya)
2. Bagaimana program Kotaku dibandingkan dengan program lain untuk mengatasi kawasan kumuh?
3. Siapa saja pelaksana program?
4. Sosialisasi yang dilakukan kepada penyelenggara program
5. Komitmen para penyelenggara program

Perencanaan

1. Siapa saja yang melakukan persiapan perencanaan program?
2. Bagaimana penyusunan perencanaan dilaksanakan program Kotaku?

Pelaksanaan

1. Penganggaran yang dilakukan oleh setiap penyelenggara program
2. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan aturan yang telah ditetapkan kepada penyelenggara terkait
3. Pembagian tugas dalam pelaksanaan program
4. Kerja sama para aktor program dalam pelaksanaan program

Keberlanjutan

1. Aktor/pelaku monitoring program
2. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penguatan program

Faktor-Faktor

1. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program Kotaku?
2. Apa dampak yang terlihat dengan adanya program Kotaku?
3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat?

C. Masyarakat

Persiapan

1. Sosialisasi yang dilakukan kepada penyelenggara program
2. Komitmen para penyelenggara program

Perencanaan

1. Siapa saja yang melakukan persiapan perencanaan program?
2. Bagaimana penyusunan perencanaan dilaksanakan program Kotaku?

Pelaksanaan

1. Penganggaran yang dilakukan oleh setiap penyelenggara program
2. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan aturan yang telah ditetapkan kepada penyelenggara terkait
3. Pembagian tugas dalam pelaksanaan program
4. Kerja sama para aktor program dalam pelaksanaan program

Keberlanjutan

1. Aktor/pelaku monitoring program
2. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penguatan program

Faktor-Faktor

1. Apakah terdapat kendala dalam pelaksanaan program Kotaku?
2. Apa dampak yang terlihat dengan adanya program Kotaku?
3. Bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat?

Lampiran 2 Dokumentasi



Kondisi Jalan di RW 05



Kondisi RTH (Ruang Terbuka Hijau) di RW 05



Kondisi Penerangan Jalan di RW 05



Kondisi Talud di RW 05



Wawancara dengan Ketua dan Anggota BKM Mangunharjo



Wawancara dengan Masyarakat BKM Mangunharjo



Wawancara dengan Kepala Korkot Program Kotaku

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Koordinator Kota Program Kotaku di Kota Semarang

Fenomena	Pertanyaan	Informan (Korkot Kotaku Kota Semarang)
Persiapan	1. Bagaimana program Kotaku dibandingkan dengan program lain untuk mengatasi kawasan kumuh?	Kalau itu mungkin dari pendanaannya, sebenarnya programnya sama lebih bedanya ke pendanaannya. Kebetulan yang NUSP kan sudah selesai. Selain itu dari pendampingan juga berbeda, kalau NUSP misal ada 10 wilayah yang mendapat pendanaan nah hanya 10 itu yang didampingi. Kalau kotaku ini kan selain wilayah sasaran juga didampingi guna mencegah terjadinya kumuh.
	2. Sosialisasi yang dilakukan kepada penyelenggara program	Jadi ini relatif sama ya di setiap wilayah dengan adanya sosialisasi dulu kalau kelurahan yang bersangkutan mendapat program dan pendanaan untuk menangani kumuh. Dalam sosialisasi itu akan terjadi rembug yang terundang ada masyarakat perwakilan RT/RW, LPMK, dan tokoh-tokoh yang ada di sana, biasanya yang delegasi mengundang ya kelurahan dengan BKM gitu. Di sana akan dirembug bersama terkait rencana untuk menangani kumuh itu gimana. Dan melihatnya itu di skor kumuh, biasanya direncanakan untuk mengatasi itu.
Perencanaan	3. Bagaimana penyusunan perencanaan dilaksanakan program Kotaku?	Dasar perencanaan itu RPLP (rencana penataan lingkungan permukiman) jadi itu sebagai dokumen perencanaan yang

		<p>telah disusun. Dalam kegiatan sosialisasi, selanjutnya ada rembug-rembug lanjutannya yaitu menyusun perencanaan sesuai anggaran yang ada. Ada perwakilan RT/RW, lurah, BKM.</p> <p>Perencanaan lanjutan yaitu adanya rembug ulang adanya kesepakatan penentuan bersama. Kalau sudah akan ada penyiapan-penyiapan yaitu pembentukan KSM yaitu dalam rangka calon pelaksana yang akan memfasilitasi itu karena kalo BKM itu tidak boleh langsung jadi KSM itu kan adanya panitia-panitia kecil. KSM itu lebih dari satu sesuai kebutuhan. Tahun kemarin minimal ada 1 KSM kurang lebih anggaran 400 juta apabila lebih dari itu maka ada 2 KSM dengan anggaran total kurang lebih 1 miliar.</p> <p>Setelah KSM terbentuk membentuk proposal yang disusun bersama yang bertanggung jawab itu KSM termasuk DEDnya.</p> <p>Setelah adanya perencanaan dan pembentukan KSM kemudian ada proses untuk kesiapan perencanaan konstruksi.</p>
	4. Penganggaran yang dilakukan oleh setiap penyelenggara program	<p>BKM harus menyusun dokumen pencairan, setelah siap lalu dana akan disalurkan dari pusat melalui BKM setelah itu baru ke KSM tidak boleh cash namun transfer ke toko yang bersangkutan.</p> <p>Untuk pencairan dana bisa ada 2 tahap misal kalau Mangunharjo 1M nah itu pada tahap satu 70% cair setelah proses pencairan itu kan ada progress fisik dan sudah memenuhi syarat pencairan tahap 2 dapat dilakukan.</p>
	5. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan aturan	Setelah menyusun dokumen pencairan maka akan ada

	yang telah ditetapkan kepada penyelenggara terkait	pembekalan terhadap KSM yaitu persiapan konstruksi melalui MP2K (musyawarah persiapan pelaksanaan) agar dalam pelaksanaannya tidak bingung karena sudah sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Yang mengadakan pembekalan memang BKM dengan didampingi oleh fasilitator.
	6. Aktor/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan	Yang jelas pelibatangannya ada BKM lurah RT RW tokoh-tokoh masuk Kalau untuk pekeranya itu diprioritaskan pekerja setempat di kelurahan tersebut. Prinsipnya itu mengutamakan pekerja setempat
	7. Pembagian tugas dalam pelaksanaan program	Sesuai porsinya masing2 Kalau BKM kelurahan itu bersifat melihat dan memantau tidak terlibat secara langsung. KSM bertanggung jawab memfasilitasi dan menyukseskan kegiatan. Pekerja itu sendiri berasal dari masyarakat. Di BKM itu sendiri kan ada bagian UPL nya nah itu bagian yang bertanggung jawab untuk mengawasi apakah pelaksanaan itu sesuai dengan aturan yang ada. Faskel sering karena kadang kan setiap KSM tidak semua paham akan DED jadi apapun yang dapat dikomunikasikan pendamping itu sangat dibutuhkan. Pelaporan maupun kelayakan itu dibantu oleh pendamping.
	8. Aktor/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan	Yang jelas pelibatangannya ada BKM lurah RT RW tokoh-tokoh masuk Kalau untuk pekeranya itu diprioritaskan pekerja setempat di kelurahan tersebut. Prinsipnya itu mengutamakan pekerja setempat
Keberlanjutan	9. Aktor/pelaku monitoring program	Ada KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemeliharaan) itu

		<p>ketika bangunan sudah dilakukan maka keberlanjutannya harus ada pemeliharannya, misalnya di Mangunharjo itu kan ada pompa nah itu pompa untuk ketika hujan dihidupkan untuk airnya mengalir ke sungai jadi untuk menjamin tidak mangkrak tidak rusak jadi kita pastikan KPP</p> <p>Kalau kita itu kan ada fasilitator/pendamping lapangan langsung, ada korkot dan asisten korkot yang bertugas untuk mengendalikan instfrastruktur di lapangan</p> <p>Dilevel provinsi ada USP ada tim leader, kemudian yang bertugas khusus di insfrastruktur ialah ahli insfrastruktur.</p> <p>Di luar itu ada satker untuk PIP (Pemb ins Perkotaan)</p> <p>Diluar independen ada pemeriksaan BPKP terkait dengan pelaksana kegiatan</p>
	<p>10. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penguatan program</p>	<p>KPP itu dari masyarakat setempat karena yang memanfaatkan dan tau persis kan masyarakat.termasuk nanti ada kosekuensi pembiayaan pemeliharaan juga tergantung kebijakan masing-masing kelompok wilayah tersebut</p> <p>Kalau di level masyarakat tentunya ada kelurahan LPMK itu biasanya luwes tidak menutup siapapun boleh ikut mengawasi.</p>

BKM Kelurahan Mangunharjo

Fenomena	Pertanyaan	Informan (BKM Mangunharjo)
Persiapan	1. Siapa saja pelaksana program?	Pada tahap ini yang melakukan persiapan dari awal adalah panitia pelaksana yang mana ini fasilitator dari kota ke BKM dan masyarakat
	2. Sosialisasi yang dilakukan kepada penyelenggara program	Pada tahap persiapan ada dua kegiatan yaitu sosialisasi dan Rembug Kesiapan Masyarakat. Sosialisasi ada yang di dalam ruangan ada di luar ruangan seperti sertifikasi tukang itu. Setelah sosialisasi yang mana menyampaikan bahwa ada program ini lalu ada pelatihan-pelatihan. Pelaksanaan pra itu dokumen proposal dan LPJ-nya mulai ini persiapan sebelum perencanaan dimulai bersama fasilitator mengadakan pelatihan pelatihan, seperti pelatihan lurah, pelatihan livelihood, pelatihan BKM, pengembangan media sosialisasi program Kotaku, pelatihan keterampilan sertifikasi tukang, serta pelatihan KSM pelaksana pembangunan/KPP.
Perencanaan	3. Bagaimana penyusunan dilaksanakan program Kotaku?	Pada tahap perencanaan meliputi kegiatan review RPLP (rencana pembangunan/proposal), penyiapan KSM dan pembentukan KPP, penyusunan dokumen teknis BPM, musyawarah persiapan pekerjaan yang didampingi faskel setelah di acc kota.
Pelaksanaan	4. Penganggaran yang dilakukan oleh setiap	Pencairan BLM

	penyelenggara program	Pencairan itu 3 kali pencairan per termin
	5. Aktor/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan	Kegiatan yang dikerjakan program kotak pada tahun 2019 ada 2 KSM, terdiri dari KSM Tanggul Sari 1 dan KSM Tanggulsari 2
	6. Pembagian tugas dalam pelaksanaan program	Dalam kegiatan ini, yang melaksanakan pembangunan infrastruktur adalah masyarakat itu sendiri melalui 2 KSM. KSM Tanggul Sari 1 mengerjakan di jalan paving, talud jalan, drainase, septictankcomunal, dan penerangan jalan dengan total dana Rp 467.000.000,- sedangkan KSM Tanggul Sari 2 mengerjakan talud jalan, jalan paving, pintu air, drainase, becak sampah 2 unit, dan penerangan jalan total dana Rp 528.000.000,- Semua kegiatan ini berada di RW 05
Keberlanjutan	7. Aktor/pelaku monitoring program	Evaluasi fisik dan evaluasi administrasi. Yang melakukan monitoring ialah faskel yang datang hampir di setiap minggu
	8. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penguatan program	Masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui KSM atau BKM

Masyarakat Kelurahan Mangunharjo

Fenomena	Pertanyaan	Informan (Korkot Kotaku Kota Semarang)
Persiapan	1. Metode yang digunakan Korkor Kotaku Kota Semarang dalam menyampaikan program Kotaku kepada kelurahan dan masyarakat	Jadi yang setahuu saya jadi untuk sosialisasi di kelurahan itu dikasi tau ada program kotaku, sebelum itu dibentuk KSM.
Perencanaan	2. Kejelasan sosialisasi yang dilaksanakan Korkot Kotaku Kota Semarang kepada masyarakat yang terlibat	Kalau perencanaan masyarakat yang dilibatkan paling tokoh masyarakat sebagai perwakilan. Setelah itu disampaikan secara intern kepada masyarakat luas melalui rapat-rapat warga dan disampaikan semuanya. Sehingga benar-benar masyarakat luas tahu apabila ada program ini.
	3. Siapa saja yang melakukan persiapan perencanaan program?	Kalau perencanaan masyarakat yang dilibatkan paling tokoh masyarakat sebagai perwakilan. Setelah itu disampaikan secara intern kepada masyarakat luas melalui rapat-rapat warga dan disampaikan semuanya. Sehingga benar-benar masyarakat luas tahu apabila ada program ini.
	4. Bagaimana penyusunan dilaksanakan program Kotaku?	Ya dari perencanaan ya didampingi faksel dan menerima juga masukan-masukan dari masyarakat
Pelaksanaan	5. Sosialisasi, edukasi, dan pelatihan aturan yang telah ditetapkan kepada penyelenggara terkait	Adanya pelatihan namanya sertifikasi untuk tukangnyanya yang diwakili 5 orang karena kuotanya hanya 5 orang, padahal jumlah tukang lebih dari itu
	6. Kerja sama dengan masyarakat dalam pelaksanaan program	Ya dengan adanya ini ya memberi minumlah, apalah, ya swadaya ya membantu lah ketika pelaksanaan pembangunan
Keberlanjutan	7. Aktor/pelaku monitoring program	Adanya kunjungan dari korkot, provinsi

	8. Pembagian kewenangan dalam implementasi program Kotaku	Pembagian tugas ya tukang ya tukang,kalau bagian pekerja ya berkaitan dengan material. Setiap hari ada tukang 5-7 ya dirolling Talud paving lampu rth lalu gerobag sampah, kalo ksm yang satu ada tambahan septictank
	11. Keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan penguatan program	KPP itu dari masyarakat setempat karena yang memanfaatkan dan tau persis kan masyarakat.termasuk nanti ada kosekuensi pembiayaan pemeliharaan juga tergantung kebijakan masing-masing kelompok wilayah tersebut Kalau di level masyarakat tentunya ada kelurahan LPMK itu biasanya luwes tidak menutup siapapun boleh ikut mengawasi.